

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK  
BIDANG PENANAMAN MODAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : Kalimantan Tengah  
Kabupaten/Kota : Lamandau  
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Bulan : November 2024

Formulir 2

No	SUB BIDANG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN					MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan Permasalahan		
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Jumlah			Swakelola		KontraktuaL		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik			
					PAGU DAK (Rp.)	Dana Penunjang DAK	Total Biaya (Rp.)	Volume	(Rp.)	Volume	(Rp.)		(Rp.)	(%)	Volume			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				387.308.000	0	387.308.000		387.308.000	-	-		355.993.300	91,91		92,00	268.796.120	
	a Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				387.308.000	0	387.308.000		387.308.000	-	-		355.993.300	91,91		276,00	268.796.120	
	1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan UsahanyaPelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	Dokumen		58.097.000		58.097.000	5	58.097.000	5	-		53.239.600	91,64	5	96,00	55.773.120	
	2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	142	Dokumen		213.023.000		213.023.000	142	213.023.000	142	-		213.023.000	100,00	142	100,00	213.023.000	
	3 Pengawasan Penanaman Modal	5	Dokumen		116.188.000		116.188.000	5	116.188.000	5	-		89.730.700	77,23	4	80,00	92.950.400	
					387.308.000		387.308.000		387.308.000	-	-		355.993.300	91,91		92,00	361.746.520	

**Kodefikasi Masalah**  
**Kode Masalah : (diberi penjelasan)**  
1. Permasalahan terkait dengan peraturan perundangan  
2. Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis  
3. Permasalahan terkait dengan rencana kerja dan anggaran SKPD  
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD  
5. Permasalahan terkait dengan SK penetapan pelaksanaan kegiatan  
6. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan ternder pekerjaan kontrak  
7. Permasalahan terkait dengan persiapan pekerjaan swakelola  
8. Permasalahan terkait dengan penerbitan SP2D  
9. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kontrak  
10. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola  
11. Permasalahan lain-lain

**Keterangan:**  
1. Pelaksana DAK Non Fisik adalah SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing  
2. Bidang DAK Non Fisik sesuai dengan Undang-undang APBN  
3. Ruang lingkup/menu kegiatan sesuai deng Perpres tentang Petunjuk Teknis Non DAK Fisik  
4. Kolom 18 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia  
5. Berisi total nilai realisasi kumulatif sampai dengan Triwulan pelaporan  
  
(\*) pilih jenis DAK Non Fisik/ coret yang tidak perlu  
(\*\*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan dimasing-masing bidang Non DAK Fisik  
(\*\*\*) Metode pembayaran per kontrak/SPK: sekaligus atau Termin

Nanga Bulik, Desember 2024  
Kepala DPMPTSP,  
  
**MUL'ATMIDY,S.Sos.,M.A.P**  
NIP. 197904022005021000